

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan pada prinsipnya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dalam pelaksanaannya pembangunan itu selalu melibatkan lingkungan dan tidak ada pembangunan yang tidak melibatkan lingkungan, baik lingkungan fisik maupun sosial. Dalam hal ini dampak pembangunan ada yang bersifat positif atau menguntungkan dan juga dampak negatif atau merugikan. Salah satu yang merasakan dampaknya adalah masyarakat yang berada di sekitar pembangunan tersebut.

Dalam pembangunan infrastruktur bendungan misalnya yang membutuhkan lahan untuk infrastruktur bendungan itu sendiri maupun untuk genangan air. Lahan yang dibutuhkan dan digunakan bisa mencapai ribuan hektar dimana di dalam lahan tersebut terdapat makhluk hidup yang menempatinya termasuk manusia. Maka disitu terjadi perubahan fisiografis atau bentuk lahan dari tadinya lahan kering di sekitar lembah sungai serta perbukitan disekitarnya berubah menjadi lahan basah yang tergenang air bendungan. Tentunya dengan perubahan tersebut setidaknya akan berpengaruh juga terhadap keadaan manusia atau masyarakat disekitarnya. Menurut Abdullah (1996) tentang transformasi wilayah menyatakan bahwa:

“transformasi selalu menyangkut perubahan masyarakat dari suatu masyarakat yang lebih sederhana ke masyarakat yang lebih modern dalam satuan waktu yang berbeda digunakan untuk memahami dampak transformasi wilayah terhadap kondisi sosial, ekonomi, cultural, dan teknologi”.

Dalam hal ini bahwa dari perubahan tersebut akan mengubah juga tatanan kehidupan manusia di dalamnya baik dalam segi ekonomi dan sosial budaya. Seperti yang terjadi pada pembangunan Waduk Jatigede di Kabupaten Sumedang, dimana perubahan wilayah serta lahan didalamnya mengakibatkan perubahan dalam segi lingkungan fisik dan sosial masyarakat. Menurut Furi (2007, hlm. 30) menjelaskan bahwa:

“konversi lahan atau alih fungsi lahan yang terjadi merubah status kepemilikan lahan dan penguasaan lahan. Perubahan dalam penguasaan lahan di pedesaan membawa dampak bagi perubahan

pendapatan dan kesempatan kerja masyarakat yang menjadi indikator kesejahteraan masyarakat desa”

Pembangunan Waduk Jatigede sudah dicanangkan sejak zaman Presiden Soekarno. Realisasi rencana pembangunan Waduk Jatigede dilaksanakan mulai tahun 1970 dan tahun 1982/1983 dengan memberikan ganti rugi kepada masyarakat yang terkena dampak pembangunan Waduk ini secara bertahap. Namun kemudian pembangunan waduk ini terus tersendat-sendat dan tidak nampak untuk segera diselesaikan, sehingga muncul berbagai persoalan yang cukup jelimet. Kemudian dilanjutkan pada tahun 2008 sampai 2014 dan mulai penggenangan pada pertengahan tahun 2015 (Purnama 2015, hlm. 135).

Waduk Jatigede dibangun di areal lahan pertanian, hutan dan pemukiman yang cukup ramai. Proses ganti rugi tanah warga sudah dilakukan sejak beberapa waktu yang lalu sekitar tahun 1982-2004 dan puncaknya pada tanggal 31 Agustus 2015, saat pembangunan intensif dan penggenangan mulai dilakukan. Sebagian besar lahan produktif yang menjadi genangan adalah lahan pertanian.

Secara fisik, pembangunan Waduk Jatigede telah menenggelamkan lahan seluas 6.738 hektar di dalam 28 Desa di 5 kecamatan yaitu: Jatigede, Darmaraja, Cisitu, Wado dan Jatinunggal. Lahan tersebut meliputi: sawah, hutan, pemukiman warga, ladang, kebun dan lain-lain. Dari 28 desa yang tergenang 6 diantaranya telah dihapuskan karena seluruh wilayahnya tergenang oleh air. Sedangkan jumlah penduduk yang harus dipindahkan dari lokasi genangan berdasarkan hasil sensus yang dilakukan oleh PPSDAL tahun 2000, berjumlah 6.642 KK atau sekitar 19.542 jiwa.

Masyarakat yang terkena genangan diharuskan pindah tempat tinggal, ada yang pindah secara perorangan mengikuti saudara di tempat lain yang tidak terkena genangan, ada juga bedol desa atau perpindahan penduduk secara bersama menempati lahan baru untuk berkumpul kembali. Rencana relokasi dengan penyediaan hunian bagi masyarakat terdampak yang belum memiliki tempat pindah telah dicanangkan oleh pemerintah. Namun mendapat penolakan dari masyarakat terdampak karena masyarakat ingin penggantian rugi berupa uang ganti rugi. Kemudian dikeluarkanlah

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede, dimana menurut Pasal 3 ayat (1) yang isinya: “Kepada Penduduk terkena dampak pembangunan waduk jatigede diberikan tempat penampungan pemukiman baru berupa rumah pengganti berupa uang tunai”.

Dengan keluarnya peraturan tersebut maka masyarakat mendapat uang ganti rugi untuk membeli dan membangun rumah sendiri. Setelah penggenangan mulai dilakukan pada tanggal 31 Agustus 2015 masyarakat ada yang sudah pindah tetapi ada juga yang belum. Masyarakat pindah ada yang mengelompok kembali di suatu lahan ada juga perorangan ke kelompok pemukiman yang baru. Berikut tabel beberapa daerah relokasi yang cenderung berkumpul di suatu wilayah:

Tabel 1. 1 Blok Relokasi Masyarakat Terkena Dampak Genangan

| No | Kecamatan | Desa | Blok Relokasi | Jumlah KK |
|---------------|-------------|--------------|---------------|--------------|
| 1 | Darmaraja | Tarunajaya | Pasir Kandaga | 72 |
| | | | Kalapa Dua | 92 |
| | | Sukamenak | Ciputat | 150 |
| | | Paku Alam | Cisema | 150 |
| 2 | Wado | Wado | Kampung Baru | 242 |
| | | | Cisurat | Gunung kerud |
| | | Cukanggaleuh | | 60 |
| | | Cipadaimut | 78 | |
| 3 | Jatinunggal | Pawenang | Cipondoh | 276 |
| | | Sirnasari | Batukasur | 83 |
| 4 | Jatigede | Mekarasih | Cihegarmekar | 65 |
| | | | Panyiriban | 58 |
| | | Ciranggem | Batunini | 71 |
| | | | Pasirpogor | 96 |
| | | Jemah | Sabeulit | 114 |
| Jumlah | | | | 1.644 |

Sumber: Hasil Penelitian 2019

Relokasi atau *resettlement* merupakan salah satu alternatif untuk memindahkan masyarakat yang terkena genangan air waduk. Relokasi diharapkan memberikan kemudahan bagi masyarakat yang mencari tempat tinggal baru. Kini pasca penenggelaman warga telah direlokasi menempati

tempat tinggal barunya tersebut meskipun relokasi yang dilakukan adalah masing-masing keluarga. Namun di tempat barunya ini masyarakat harus mampu beradaptasi supaya dapat melanjutkan hidupnya lebih baik lagi. Menurut penelitian yang dilakukan Annisa Nurazizah (2017, hlm. 405) strategi adaptasi yang dilakukan warga relokasi di Blok Pasirkandaga Desa Tarunajaya yaitu: 1) Strategi Aktif atau strategi untuk menambah pendapatan keluarga; 2) Strategi Pasif atau strategi pengurangan biaya pengeluaran agar pendapatan mencukupi kebutuhan sehari-hari; 3) Strategi jaringan sosial yaitu memanfaatkan akses sosial baik formal maupun informal. Dengan beradaptasi tersebut warga diharapkan dapat meningkatkan taraf kesejahteraan hidupnya.

Namun peneliti melihat terdapat kecenderungan perbedaan tatanan kehidupan dan kesejahteraan sesudah adanya pembangunan Waduk Jatigede dan berpindah tempat tinggal. Menurut Goodland dalam Lubis (1993, hlm. 25) menyatakan bahwa:

“Orang sering dimukimkan kembali tanpa memperhatikan kepentingan-kepentingan individual, masyarakat atau sosial mereka. Perhatian sering tidak diberikan mengenai kesejahteraan mereka di kemudian hari: bagaimana atau apakah mereka dapat memperoleh pekerjaan, menerima pendidikan atau perawatan kesehatan, mempertahankan identitas kebudayaan dan sosial mereka, dijamin keselamatan dan kontinuitas sosial mereka”.

Peneliti juga melihat perbedaan antara masyarakat yang berada dekat dengan jalan raya dan fasilitas umum dengan yang jauh dari jalan raya dan fasilitas umum tersebut. Karena jalan raya ini merupakan prasarana untuk melakukan mobilitas dan kegiatan sehari-hari dalam menunjang kehidupan sehari-hari. Menurut Suharyono dan Moch. Amien (1994, hlm. 28) yang mengemukakan 10 konsep esensial geografi salah satunya adalah konsep jarak, konsep jarak yang dimaksud yakni:

“Konsep jarak ini mempunyai arti penting bagi kehidupan sosial dan ekonomi. Jarak berkaitan erat dengan arti lokasi dan upaya pemenuhan kebutuhan atau keperluan pokok kehidupan, pengangkutan barang dan penumpang. Oleh karena itu, jarak tidak hanya dinyatakan dengan ukuran, jarak lurus di udara yang mudah diukur dengan peta (dengan memperhatikan skala peta), tetapi dapat pula dinyatakan sebagai jarak tempuh baik yang dikaitkan dengan

waktu perjalanan yang diperlukan maupun satuan biaya angkutan. Kemajuan teknologi dapat mempengaruhi jarak tempuh maupun biaya angkutan antara dua tempat”.

Dalam hal ini jarak menentukan tingkat kemudahan dalam mencapai suatu fasilitas umum. Semakin jauh jarak maka semakin berkurang tingkat kemudahan tersebut, ditambah kondisi prasarana seperti jalan yang kurang memadai bahkan bisa dikatakan jauh dari kata layak. Terkait dengan kemudahan mencapai suatu lokasi tertentu maka berhubungan dengan tingkat keterjangkauan dari lokasi tersebut. Karena keterjangkauan pun mempengaruhi aktivitas yang bisa dilakukan oleh suatu masyarakat di lokasi tertentu. Serta aktivitas yang dilakukan untuk menunjang kebutuhan sehari-hari. Semakin tinggi produktifitas maka kesejahteraan suatu keluarga tersebut semakin bagus.

Kesejahteraan adalah suatu konsep untuk menyatakan kualitas hidup dan rasa penuh kenyamanan dalam menjalankan kehidupan. Menurut Rambe (2004, hlm. 1),

“kesejahteraan adalah sebuah tata kehidupan dan penghidupan sosial, material, maupun spiritual yang diikuti dengan rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman diri, rumah tangga serta masyarakat lahir dan batin yang memungkinkan setiap warga negara dapat melakukan usaha pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri sendiri, rumah tangga, serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi serta kewajiban manusia sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945”.

Menurut Badan Pusat Statistik (2015) ada 10 indikator kesejahteraan keluarga yang meliuti: (1) Pendapatan rumah tangga, (2) Konsumsi/ Pengeluaran rumah tangga, (3) Keadaan tempat tinggal, (4) Fasilitas tempat tinggal, (5) Kesehatan anggota rumah tangga, (6) Kemudahan pemanfaatan fasilitas tenaga kesehatan, (7) Kualitas pendidikan anggota rumah tangga, (8) Kemudahan memasukkan anak ke jenjang pendidikan, (9) Rasa aman dari gangguan kejahatan, (10) Kemudahan mengakses teknologi informasi dan komunikasi.

Untuk itu penulis tertarik meneliti tingkat kesejahteraan masyarakat yang berada di setiap blok relokasi dengan judul penelitian: **“Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Terdampak Pembangunan Waduk Jatigede Kabupaten Sumedang”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana tingkat kesejahteraan masyarakat terdampak pembangunan Waduk Jatigede?
2. Bagaimana persebaran tingkat kesejahteraan masyarakat terdampak Pembangunan Waduk Jatigede?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian di rumusan masalah sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis tingkat kesejahteraan masyarakat terdampak pembangunan Waduk Jatigede
2. Menganalisis persebaran tingkat kesejahteraan masyarakat terdampak Pembangunan Waduk Jatigede.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Sebagai bahan informasi bagi masyarakat yang telah direlokasi terkait tingkat kesejahteraan masyarakat terdampak di beberapa daerah relokasi lainnya.
2. Sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Kabupaten Sumedang, yang diharapkan dapat menjadi informasi untuk menentukan kebijakan yang berkaitan dengan daerah relokasi masyarakat serta strategi dalam menuntaskan permasalahan kesejahteraan masyarakat terutama bagi masyarakat terdampak.
3. Sebagai bahan informasi bagi peneliti selanjutnya khususnya dalam topik kesejahteraan masyarakat relokasi akibat pembangunan waduk maupun wilayah kajian berdasarkan temuan di lapangan.

1.5 Sistematikan Penulisan

Dalam sistematika penulisan disajikan pokok-pokok permasalahan yang akan dibahas yaitu :

1. **BAB I** merupakan bab yang menjadi pengantar dalam penulisan karya ilmiah ini. Pada bab ini termuat latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, struktur organisasi skripsi dan penelitian terdahulu.
2. **BAB II** berisikan landasan teoritis terkait dengan masalah yang diangkat dalam sebuah karya ilmiah. Teori-teori ataupun dalil yang terdapat pada bab ini merupakan sebagai penjawab teoritis sementara dari rumusan masalah yang diajukan.
3. **BAB III** merupakan bagian yang menerangkan prosedur dari tahap awal penelitian sampai pada akhir penelitian. Pada bab ini menjelaskan lokasi kajian penelitian, pendekatan geografi yang digunakan dalam penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, serta analisis data yang digunakan.
4. **BAB IV** merupakan bab yang berisikan hasil dari sebuah analisis data dalam sebuah penelitian. Pada bab ini menerangkan hasil suatu analisis yang berkaitan dengan kajian penelitian yang digunakan. Penjabaran hasil dari suatu penelitian yang merupakan hasil akhir dari suatu penelitian yang menghasilkan sebuah karya ilmiah.
5. **BAB V** berisikan kesimpulan dan saran yang terkait dengan hasil penelitian. Pada bagian kesimpulan akan diuraikan inti dari hasil penelitian kemudian saran berisikan saran-saran dan rekomendasi untuk sebuah penelitian yang mempunyai tema dengan kajian yang sama.

1.6 Penelitian Terdahulu

Tabel 1. 2 Penelitian Terdahulu

| No | Nama / Tahun | Judul | Masalah | Tujuan | Metode | Hasil |
|----|---------------------------|--|--|--|--|---|
| 1 | Giva Gelviandini S / 2017 | Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Nelayan di Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu | <ul style="list-style-type: none"> • Bagaimana tingkat kesejahteraan masyarakat nelayan di Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu? • Faktor-faktor dominan apakah yang paling mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat nelayan di Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu? | Untuk mengetahui keadaan tingkat kesejahteraan masyarakat nelayan serta faktor dominan yang paling mempengaruhi kesejahteraan masyarakat nelayan Kecamatan Juntinyuat. | Metode yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. | Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat nelayan berdasarkan indikator BPS cukup tinggi. Berdasarkan faktor dominan yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat nelayan Kecamatan Juntinyuat adalah faktor pendapatan |
| 2 | Achmad Ginanjar / 2016 | Tingkat Kesejahteraan Petani Perkebunan Teh Rakyat Di Kecamatan Darangdan | <ul style="list-style-type: none"> • Bagaimana tingkat kesejahteraan petani teh di perkebunan rakyat di kecamatan Darangdan Kabupaten Purwakarta? | Untuk mengetahui tingkat kesejahteraan petani teh berdasarkan indikator BPS tahun 2005 yang meliputi pendapatan, pengeluaran anggota keluarga, keadaan tempat tinggal, fasilitas | Metode yang digunakan adalah metode deskriptif | Hasil penelitian menunjukkan pendapatan petani teh rendah dengan pengeluaran keluarga cukup tinggi, sebagian besar petani teh tinggal di rumah permanen dengan fasilitas lengkap, dilihat dari segi |

| | | | | | | |
|---|--------------|--|--|--|--|--|
| | | Kabupaten Purwakarta | <ul style="list-style-type: none"> • Faktor apa saja yang paling dominan dalam mempengaruhi tingkat kesejahteraan petani teh di perkebunan rakyat di Kecamatan Darangdan Kabupaten Purwakarta? | tempat tinggal, kesehatan, kemudahan mendapatkan pelayanan kesehatan, kemudahan menyekolahkan anak dan kemudahan mendapatkan fasilitas transportasi. | | kesehatannya sebagian besar kesehatan anggota keluarga cukup bagus dan mudah mendapatkan pelayanan fasilitas kesehatan. Dalam hal pendidikan anak petani teh merasa cukup muudah tetapi cukup sulit dalam mendapatkan fasilitas transportasi. Secara umum petani teh sebagian besar memiliki tingkat kesejahteraan yang tinggi dan sebagian lagi tingkat kesejahteraan cukup rendah. |
| 3 | Rosni / 2012 | Analisis Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Nelayan Di Desa Dahari Selebar Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara | <ul style="list-style-type: none"> • Berdasarkan hasil survey awal (prapenelitian) melalui observasi, bahwa kemiskinan dan kondisi kualitas hidup masyarakat jauh dari baik, seperti rumah yang tidak layak huni, sanitasi dan air bersih yang buruk adalah kondisi pemukiman nelayan | Untuk mengetahui Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Nelayan di Desa Dahari Selebar Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara | Metode yang digunakan adalah Deskriptif pendekatan kualitatif. | Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat nelayan yaitu 42 responden (63,63%) tergolong dalam prasejahtera, 21 responden (31,81%) tergolong dalam sejahtera I, dan 3 responden (4,56%) tergolong dalam sejahtera II. Jika dikaitkan dengan Upah Minimum Kabupaten Batubara tahun 2016 yaitu sebesar Rp.2.313.625 maka seluruh |

| | | | | | | |
|---|-------------------------------------|---|--|--|---|--|
| | | | <p>yang berada di Desa Dahari Selebar Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Identifikasi masalah pada penelitian ini adalah tingkat perekonomian masyarakat pesisir yang masih kurang sejahtera. | | | <p>responden masuk dalam kategori miskin, masyarakat prasejahtera pendapatannya Rp 897.000, masyarakat sejahtera I Rp 1.149.000, dan masyarakat sejahtera II Rp 1.470.000.</p> |
| 4 | Suharno dan Trisna Anggreini / 2014 | Analisis Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Yang Bermukim Di Tepi Sungai Kahayan Di Kota Palangka Raya (Dikaji Dari Aspek Pendapatan) | <ul style="list-style-type: none"> • Bagaimana tingkat kesejahteraan masyarakat yang bermukim di tepi Sungai Kahayan di Kota Palangka Raya dari aspek pendapatan rumah tangganya? • Bagaimana faktor-faktor yang menentukan besarnya pendapatan rumah tangga tersebut? | Untuk mengkaji tingkat kesejahteraan masyarakat yang bermukim di tepi Sungai Kahayan di Kota Palangka Raya dari aspek pendapatan rumah tangganya dan menganalisis faktor-faktor yang menentukan besarnya pendapatan rumah tangga tersebut. | Metode yang digunakan adalah Deskriptif pendekatan kuantitatif. | Hasil Penelitian menunjukkan bahwa rata-rata pendapatan keluarga adalah Rp 42. 177.767 per tahun atau Rp 3.514.814 per bulan dan pendapatan perkapita sebesar Rp 848.989 per bulan, lebih tinggi dibanding angka garis kemiskinan penduduk perkotaan di Provinsi Kalimantan Tengah sebesar Rp 274.222, yang berarti bahwa secara umum masyarakat yang tinggal di tepi Sungai Kahayan di Kota Palangka Raya cukup sejahtera ditinjau aspek pendapatannya. Meskipun masih terdapat sekitar 5,56% |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|---|
| | | | | | | <p>penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan dengan rata-rata pendapatan per kapita sebesar Rp 250.000 per bulan. Secara statistik, faktor-faktor yang berpengaruh nyata terhadap pendapatan rumah tangga yang bermukim di tepi Sungai Kahayan di Kota Palangka Raya adalah besarnya pengeluaran rumah tangga dan tingkat pendidikan kepala keluarga, sedangkan faktor umur kepala keluarga, jumlah anggota keluarga dan pekerjaan sampingan tidak terbukti berpengaruh nyata terhadap besarnya pendapatan rumah tangga.</p> |
|--|--|--|--|--|--|---|